

---

---

## Peran UN Women dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Rwanda tahun 2013 – 2018

Putu Nadia Pranadewi<sup>1)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

---

### Abstrak

Organisasi internasional yang bergerak di bidang kesejahteraan perempuan adalah United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, atau UN Women. Organisasi tersebut memiliki target strategis dalam kinerjanya, yang salah satunya adalah untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk kekerasan. Perempuan Rwanda sendiri masih mengalami kekerasan, terutama dari pasangan intimnya. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim di Rwanda mencapai hingga 56 persen, dan angka ini dapat dikatakan tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi rata-rata kawasan Afrika Sub-Sahara yang hanya mencapai 44 persen. Mempertimbangkan isu tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah, yaitu “bagaimana UN Women berperan sebagai aktor independen dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan di Rwanda?”. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan fungsi yang dapat diambil oleh UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Rwanda menggunakan konsep peran dan fungsi organisasi internasional. UN Women ikut terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui aktivitasnya dalam *United Nations Development Assistance Plan* tahun 2013-2018 (UNDAP I) yang mendukung realisasi SDGs. Menggunakan metode kualitatif dan data sekunder dalam analisis, penulis menemukan bahwa UN Women dapat berperan sebagai aktor independen untuk mendukung pencapaian SDG 5 melalui tiga fungsi. Pertama, fungsi sosialisasi ditunjukkan dengan mengubah perilaku masyarakat Rwanda dalam menanggapi kekerasan terhadap perempuan melalui MenEngage dan kampanye HeforShe. Kedua, fungsi operasi ditunjukkan melalui pemberian bantuan teknis dan operasi pada Isange One Stop Centre dan Safe Mini-Market. Ketiga, fungsi artikulasi dan agregasi ditunjukkan melalui integrasi penanganan kekerasan terhadap perempuan pada program-program UNDAP I.

**Kata-kunci** : Kekerasan terhadap Perempuan, Organisasi Internasional, *Sustainable Development Goals*, UN Women.

---

### Abstract

*International organizations which played an important role in the welfare of women is the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, or UN Women. The organization works through several strategic targets, one of which is to free women from all forms of violence. Rwandan women*

*still experience violence from their intimate partners, with prevalence that reaches up to 56 percent, and this figure is considerably high when compared to the average prevalence in Sub-Saharan Africa of 44 percent. Considering the issues, a research problem is drawn, "how does UN Women act as an independent actor in tackling the violence against women in Rwanda?". This paper aims to describe the roles and functions that UN Women partake in tackling violence against women (VAW) in Rwanda using the concept of role and function of international organization. UN Women is involved in efforts to tackle VAW through its activities under the 2013-2018 United Nations Development Assistance Plan (UNDAP I), which supports the realization the SDGs. Using qualitative methods and secondary data in the analysis, the author found that UN Women can act as an independent actor that supports the realization of SDG 5 through three functions. Firstly, the socialization function is shown through MenEngage and HeforShe, which changed Rwandans perspective on VAW. Secondly, the operations function is shown through technical and operational aids of Isange One Stop Center and Safe Mini-Market. Thirdly, the articulation and aggregation function is shown through the integration of VAW management in UNDAP I.*

**Keywords :** *International Organization, Sustainable Development Goals, UN Women, Violence against Women.*

---

#### **Kontak Penulis**

Putu Nadia Pranadewi  
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana  
Denpasar, 80118  
Telp: +62 82237800727  
E-mail: nadiapranadewi@unud.ac.id

## PENDAHULUAN

Organisasi internasional adalah entitas yang mampu mengambil peranan penting dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dapat berperan dalam memenuhi hak pendidikan anak di Nigeria (Dwiyani, et al., 2015). Organisasi internasional juga dapat berperan dalam bekerja untuk kesehatan perempuan, seperti United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) yang menangani HIV/AIDS di kalangan perempuan Afrika Selatan (Apsari, et al., 2019). Terdapat pula United Nations Development Programme (UNDP) yang bekerja mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Sudan Selatan (Yuana, et al., 2018). Diantara berbagai organisasi internasional yang eksis, terdapat satu entitas United Nations (UN) yang secara spesifik bekerja di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, atau UN Women.

UN Women adalah organisasi internasional yang memiliki mandat untuk memimpin, mempromosikan, dan mengoordinasikan upaya untuk merealisasikan hak dan kesempatan bagi perempuan (UN Women, n.d.). Terdapat empat strategi prioritas yang menjadi acuan kinerja UN Women, salah satunya adalah untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk kekerasan (UN Women, 2019). Hal ini didasari pula dengan adanya isu kekerasan terhadap perempuan yang masih eksis di dunia.

UN mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang menyakiti perempuan secara fisik, seksual, mental, atau penyiksaan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan sendiri bervariasi, seperti berupa ancaman, pemaksaan dan perampasan terhadap

kebebasan perempuan, baik itu di ranah publik maupun privat (United Nations, 2015). Bagi UN Women, kekerasan terhadap perempuan menjadi krusial sebab merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara global (UN Women, n.d.).

Secara global, sebanyak 30 persen perempuan di 161 negara masih mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun seksual (World Health Organization, 2021). Dari berbagai kawasan di dunia, Afrika merupakan kawasan dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan tertinggi di dunia, baik itu secara fisik maupun seksual (United Nations, 2015). Salah satu negara dengan permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang cukup signifikan di kawasan Afrika adalah Rwanda.

Perempuan Rwanda umumnya mengalami dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik dan seksual. Namun, kekerasan yang dialami perempuan Rwanda umumnya merupakan kekerasan fisik dibandingkan dengan kekerasan seksual. Pada tahun 2010, sebanyak 56 persen perempuan Rwanda pernah mengalami kekerasan fisik, sedangkan 18 persen perempuan pernah mengalami kekerasan seksual (National Institute of Statistics of Rwanda, 2012).

Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh pasangan intim, termasuk di Rwanda (United Nations, 2015). Berdasarkan *Demographic and Health Survey* tahun 2010, angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim di Rwanda mencapai hingga 56 persen pada (National Institute of Statistics of Rwanda, 2012). Sebagai negara di kawasan Afrika Sub-Sahara, angka ini tergolong cukup tinggi ketika dibandingkan dengan rata-rata kawasan yang hanya mencapai 44 persen pada tahun survei 2008 – 2019 (Muluneh, et al., 2020).

**Tabel 1. Perbandingan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan oleh Pasangan Intim**

Wilayah	Prevalensi
Afrika Sub-Sahara	44%
Rwanda	56%

(data diolah dari berbagai sumber)

Kekerasan terhadap perempuan di Rwanda dapat dikatakan tinggi ketika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan tersebut. Perbandingan ini dilakukan terhadap negara yang berbatasan langsung dengan Rwanda di kawasan Afrika Sub-Sahara, yaitu: Tanzania, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo. Berikut adalah tabel yang perbandingan berdasarkan *Demographic and Health Survey (DHS)* di negara-negara tersebut dalam jangka waktu yang serupa.

**Tabel 2. Perbandingan Prevalensi Kekerasan Fisik terhadap Perempuan oleh Pasangan Intim di Negara Kawasan Afrika Sub-Sahara**

Tahun	Wilayah	Prevalensi
2010	Rwanda	56%
2010	Tanzania	39%
2011	Uganda	43%
2013-14	Republik Demokratik Kongo	46%

(data diolah dari berbagai sumber)

**Tabel 3. Perbandingan Prevalensi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan oleh Pasangan Intim di Negara Kawasan Afrika Sub-Sahara**

Tahun	Wilayah	Prevalensi
2010	Rwanda	18%
2010	Tanzania	17%
2011	Uganda	26%
2013-14	Republik Demokratik Kongo	26%

(data diolah dari berbagai sumber)

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Rwanda direpson oleh UN

Women melalui aktivitasnya dalam *United Nations Development Assistance Plan (UNDAP)*. UNDAP periode 2013 – 2018, atau UNDAP I merupakan kerangka acuan UN Women dalam menjalankan programnya di Rwanda sekaigus merupakan upaya untuk mendukung realisasi *Millennium Development Goals (MDGs)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* (*United Nations Rwanda, 2019*).

Penulis merumuskan masalah penelitian berdasarkan isu-isu yang telah melatarbelakangi tulisan ini, yaitu “bagaimana UN Women berperan sebagai aktor independen dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan di Rwanda?”. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai peran UN Women sebagai aktor independen dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan di Rwanda.

Tulisan ini membatasi ruang lingkup penelitian untuk mempermudah proses analisis. Pertama, kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk dalam tulisan ini adalah kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan intim sebagai bentuk kekerasan yang paling umum dialami oleh perempuan Rwanda. Kedua, penulis mempertimbangkan aktivitas UN Women di Rwanda, sehingga penulis membatasi lingkup waktu yaitu pada tahun 2013 – 2018. Terakhir, peran UN Women sebagai aktor independen dipilih sebagai fokus penelitian dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi yang dijalankan UN Women sebagai organisasi internasional di Rwanda.

Penulis menggunakan beberapa tulisan dengan topik serupa sebagai bahan tinjauan pustaka untuk membantu analisis dan menjadi bahan referensi. Pertama, “Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Perspektif Feminis” karya Iqbal

Ramadhan dan Innesia Ma'sumah pada tahun 2018 yang memberikan pemahaman mengenai tujuan UN Women yang berjalan selaras dengan SDG 5, yaitu kesetaraan gender. Selain itu, tulisan ini mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas UN Women di berbagai negara, termasuk di Rwanda. Hal ini dicontohkan dengan program "*Safe Cities*" (Ramadhan dan Ma'sumah, 2018).

Kedua, skripsi dengan judul "Peran dan Fungsi UN Women dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Uganda (2014 - 2021)" karya Nesia Maya Mahardika. Skripsi ini membantu penulis untuk memahami penerapan konsep peran dan fungsi organisasi internasional Archer terhadap UN Women (Mahardika, 2021). Meski demikian, tulisan Mahardika menempatkan fungsi sebagai elemen yang berbeda dari peran. Penulis tidak sepakat dengan Mahardika, sebab Archer sendiri menuliskan bahwa organisasi internasional mengambil peran yang kemudian mempengaruhi fungsi mereka dalam sistem internasional (Archer, 2001). Penulis akan menjelaskan salah satu peran yang dapat diambil oleh UN Women, yaitu sebagai aktor independen. Peran ini akan dikaitkan dengan fungsi fungsi yang dijalankan oleh UN Women dalam isu kekerasan terhadap perempuan di Rwanda

Ketiga, terdapat artikel jurnal berjudul "Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)" karya Zhafarina Shamimi, Najamuddin Khairur Rijal dan Mohd. Agoes Afiya. Tulisan ini menjelaskan bahwa UN Women dapat menjalankan aktivitasnya untuk merealisasikan SDGs di suatu negara. Meski demikian, tulisan tersebut belum menjelaskan kaitan antara program UN Women dengan tujuan SDGs secara detail. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat relevansi

antara program UN Women dengan tujuan SDGs (Shamimi, et al. 2022). Namun, tulisan ini tidak menjelaskan kaitan program dengan SDGs secara mendetail. Penulis akan berusaha untuk melengkapi tulisan tersebut dengan menjelaskan kaitan program UN Women dengan SDG 5 secara detail.

Tulisan ini menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep kekerasan terhadap perempuan atau *violence against women* (VAW), sehingga memberikan analisis yang berbeda dalam topik penelitian serupa. Kedua konsep tersebut digunakan untuk membantu penulis dalam menjawab pertanyaan yang muncul sebagai masalah penelitian, sekaligus mampu menjelaskan peran UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Rwanda.

Pertama, penulis akan menggunakan konsep organisasi internasional oleh Clive Archer. Archer (2001) mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal berkelanjutan yang terbentuk atas persetujuan anggotanya dan terdiri dari setidaknya dua perwakilan negara berdaulat, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan dari anggotanya. Organisasi internasional kemudian dapat diidentifikasi kembali berdasarkan keanggotaannya, dimana UN Women teridentifikasi sebagai Inter-governmental Organizations (IGOs), yaitu organisasi yang dibentuk atas perjanjian antar-pemerintah.

Peran organisasi internasional menurut Archer (2001) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor. Organisasi internasional akan menjalankan fungsi yang berbeda-beda berdasarkan perannya. Dalam kasus ini, organisasi internasional memiliki kapasitas untuk berperan sebagai aktor independen. Peran ini menandakan bahwa organisasi internasional dapat menghasilkan keputusan yang tidak dipengaruhi oleh pihak

manapun, bertindak di luar kehendak negara anggotanya, dan mempengaruhi tindakan negara anggotanya.

Terdapat tiga fungsi yang relevan dengan peran UN Women sebagai aktor independen, yaitu: (1) Sosialisasi; (2) Operasi; dan (3) Artikulasi dan Agregasi. Fungsi sosialisasi dapat dijalankan oleh organisasi secara langsung untuk mengubah perilaku dan kepercayaan individu atau kelompok di suatu negara. Fungsi operasi dapat dilakukan oleh organisasi dengan fungsi yang serupa pemerintah negara, seperti: pengelolaan dana; penyedia bantuan; mengelola komoditas; membantu pencari suaka; dan memberikan layanan teknis. Fungsi artikulasi dan agregasi dengan menjadi aktor dalam proses artikulasi dan agregasi dengan langsung menyampaikan nilai-nilai organisasinya dalam sistem internasional.

Kedua, penulis menggunakan konsep kekerasan terhadap perempuan oleh UN sebagai acuan dari UN Women. Kekerasan terhadap perempuan atau *Violence Against Women* (VAW) didefinisikan sebagai seluruh tindakan kekerasan berbasis-gender yang menyakiti perempuan secara fisik, seksual, mental, atau berupa penyiksaan melalui *Declaration on the Elimination of Violence against Women* tahun 1993 (United Nations, 2015).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam analisis. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2022), adalah penelitian yang bertujuan untuk: menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif; menemukan teori; menggambarkan realitas yang kompleks; serta memperoleh pemahaman makna. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran yang dapat diambil oleh UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Rwanda. Melihat keselarasan metode ini

dengan tujuan penelitian, maka metode kualitatif dipilih agar mampu mencapai tujuan penelitian ini.

Secara keseluruhan, sumber data tulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan dokumen terhadap buku, jurnal, laporan resmi dari instansi, artikel dan video dari laman yang kredibel. Data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain sebelum digunakan oleh peneliti (Kothari, 2004). Sebagian besar dari data sekunder ini berbentuk dokumen dan artikel yang relevan dengan topik penelitian dan dihasilkan oleh UN serta agensinya, terutama oleh UN Women. Salah satu dokumen yang menjadi landasan penulis adalah laporan akhir dari *United Nations Development Assistance Plan* tahun 2013 - 2018 di Rwanda yang dihasilkan oleh UN.

Penulis melakukan analisis data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Pertama-tama, penulis melalui tahap pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu aktivitas UN Women terkait kekerasan terhadap perempuan. Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum atau memilih data yang digunakan untuk analisis. Analisis sendiri dilakukan menggunakan konsep peran dan fungsi organisasi internasional serta kekerasan terhadap perempuan, sesuai dengan masalah penelitian. Pada tahap penyajian data, peneliti menguraikan data melalui teks secara naratif dan didukung dengan penggunaan tabel. Pada tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, peneliti menuliskan hasil temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aktivitas UN Women di Rwanda

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)

adalah entitas dari United Nations yang diresmikan melalui General Assembly pada 2 Juli 2010 dengan tujuan untuk bekerja mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (United Nations, 2010). Aktivitas UN Women di Rwanda pada dasarnya mengacu pada *United Nations Development and Assistance Plan* (UNDAP) dan kerangka One UN (UN Women, n.d.).

UNDAP yang berlangsung pada tahun 2013 - 2018 meliputi berbagai program yang berjalan selaras dengan program pembangunan Pemerintah Rwanda, yaitu EPDRS II dan Rwanda Vision 2020, sekaligus bertujuan untuk mendukung realisasi MDGs dan SDGs. Implementasi UNDAP I di Rwanda utamanya dilakukan melalui *Joint Programmes* yang secara keseluruhan mengikutsertakan 21 agensi UN (United Nations Rwanda, 2018). Secara keseluruhan, UN Women telah terlibat dalam 10 dari 19 *Joint Programmes* dan memimpin dua diantaranya (UN Women, 2018).

Dua dari sepuluh *Joint Programme* yang secara langsung dipimpin oleh UN Women adalah *Joint Programme "Advancing and Sustaining Gender Equality Gains in Rwanda"* dan *"National Scale up of the Isange One Stop Centre approach in Rwanda"*. Selain itu, UN Women juga menginisiasi proyek *"Safe Cities and Safe Public Places"* di Kota Kigali, Rwanda. Berdasarkan kegiatan tersebut, penulis akan mengidentifikasi fungsi yang dapat diambil oleh UN Women terkait dengan perannya sebagai aktor independent berdasarkan program-program tersebut.

### ***Sustainable Development Goals***

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah serangkaian target dan indikator yang mencerminkan aspirasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030,

yaitu *the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Salah satu tujuan dari SDGs adalah untuk mencapai kesetaraan gender, yaitu pada tujuan ke-5 atau SDG 5. Tujuan ke-5 ini secara keseluruhan memiliki sembilan target yang meliputi berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun terdapat salah satu target dari SDG 5 yang secara spesifik bertujuan untuk mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik itu di ranah publik maupun privat, yaitu target 5.2. Target tersebut berjalan selaras dengan target strategis kinerja UN Women, yaitu untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk kekerasan (UN Women, 2019).

UNDAP I yang merupakan landasan UN Women dalam beraktivitas di Rwanda yang bertujuan untuk mencapai SDGs (United Nations, 2018). Terdapat beberapa program yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang berkaitan dengan SDG 5 di dalamnya, termasuk tentang eliminasi kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, penulis akan mengidentifikasi kaitan tindakan UN Women dalam kerangka UNDAP I dengan melihat SDGs pada SDG 5 target 5.2.

### **Fungsi UN Women dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Rwanda**

#### **a. Fungsi Sosialisasi**

Archer (2001) menjelaskan bahwa sosialisasi pada dasarnya dilakukan untuk mengubah perilaku atau keyakinan individu agar ia mematuhi nilai-nilai dan institusi dari suatu sistem. Pada level internasional, sosialisasi dapat berlangsung dalam dua level. Pada level pertama, agen sosialisasi dapat bergerak melalui berbagai lapisan dan secara langsung mempengaruhi individu dan kelompok di beberapa negara.

Selaras dengan pendapat Archer (2001), kehadiran UN Women di Rwanda salah satunya bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat Rwanda dengan secara langsung terlibat dalam berbagai aktivitas. UN Women ikut bertindak secara langsung dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya melalui *Joint Programme "Advancing and Sustaining Gender Equality Gains in Rwanda"*. Hal ini dilakukan melalui dua hal, yaitu pendekatan MenEngage dan kampanye HeforShe.

*Men Engage* adalah pendekatan yang diimplementasikan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Rwanda (Ministry of Gender and Family Promotion Rwanda, n.d.). Pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui kampanye dan sosialisasi untuk mencegah sekaligus merespon kekerasan berbasis gender (Men Engage, n.d.). Dalam kerangka *Joint Programme*, pendekatan *Men Engage* diimplementasikan melalui kampanye *HeforShe* (Ministry of Gender and Family Promotion Rwanda, n.d.). Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengubah pola pikir laki-laki di Rwanda dalam merespon kekerasan terhadap perempuan di Rwanda.

HeForShe adalah kampanye global yang diinisiasi oleh UN Women untuk melibatkan laki-laki dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kampanye ini secara global dimulai pada tahun 2014, dan dimulai di Rwanda pada tahun 2015 (UN Women Africa, 2015). *HeforShe* di Rwanda menyoroti beberapa isu, yang salah satunya adalah untuk mengeliminasi segala bentuk kekerasan berbasis gender (United Nations Rwanda, 2018). Kampanye *HeForShe* di Rwanda memperoleh 206.000 komitmen laki-laki untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (United Nations Rwanda, 2018).

Berdasarkan upaya *Men Engage* dan *HeforShe*, dapat dilihat bahwa UN Women berupaya untuk terlibat secara langsung dalam mengubah perilaku masyarakat Rwanda, terutama untuk mengubah pola pikir laki-laki Rwanda terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Hal ini ditunjukkan melalui perolehan komitmen 206.000 laki-laki secara nasional dalam kampanye *HeforShe* untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Sebagai pemimpin *Joint Programme "Advancing and Sustaining Gender Equality Gains in Rwanda"*, maka UN Women telah menjadi *agent of change* yang menjalankan fungsi sosialisasi pada level pertama.

## b. Fungsi Operasi

Organisasi internasional dapat menjalankan fungsi operasi ketika ia bertindak secara langsung memberikan bantuan di suatu negara. Selaras dengan pendapat Archer (2001), agensi UN seperti UN Women juga secara langsung ikut terlibat dalam memberikan bantuan operasi. Hal ini ditunjukkan melalui *Joint Programme "National Scale up of the Isange One Stop Centre approach in Rwanda"* pada proyek Isange One Stop Centre dan *"Safe Cities and Safe Public Places"* pada proyek *Safe Mini-Market*.

IOSC merupakan bentuk intervensi yang paling signifikan dalam menangani kekerasan berbasis gender di Rwanda, sebab dapat memberikan bantuan secara holistik (2018). Pertama kali dibangun pada tahun 2009, IOSC merupakan proyek yang menggunakan pendekatan holistik dalam merespon kekerasan berbasis gender. Pendekatan holistik ini meliputi: dukungan medis; legal; forensik; investigasi; psikososial; serta jaminan keamanan. IOSC sendiri dirancang untuk membantu korban kekerasan di Rwanda, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Maka dari itu, IOSC mampu mencegah dan



merespon kekerasan terhadap perempuan (UN Women, 2019).

UN Women ikut terlibat sebagai agensi pemimpin dalam *Joint Programme "National Scale up of the Isange One Stop Centre approach in Rwanda"*. Sebagai agensi pemimpin, UN Women memberikan bantuan pengelolaan dana, bantuan teknis berupa pelatihan pegawai, dan bantuan operasional lain seperti pengadaan fasilitas. Selama periode UNDAP I, jumlah IOSC juga terus bertambah. Mulanya, terdapat dua IOSC pada tahun 2013. Namun, jumlah ini meningkat signifikan pada akhir periode UNDAP I di tahun 2018, yaitu mencapai hingga 44 IOSC (United Nations Rwanda, 2018). Sebagian besar dari IOSC ini memperoleh bantuan melalui UN Women, baik itu dalam peningkatan jumlah maupun kapasitas pelayanannya (UN Women, 2018).

*Safe Cities and Safe Public Places* pada mulanya adalah *pilot project* yang dijalankan oleh UN Women di Kota Kigali, Rwanda. Proyek ini bertujuan untuk membuat ruang publik di kota-kota menjadi aman dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kota Kigali di Rwanda dipilih sebagai satu dari sembilan kota pertama yang menjalankan proyek ini. Secara umum, terdapat tiga aktivitas utama, yaitu: (1) pembangunan "*Safe Mini-Market*" bagi pedagang perempuan; (2) kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik; dan (3) pemasangan kamera pada transportasi publik (United Nations Rwanda, 2018).

*Safe Mini-Market* adalah proyek dari *Safe Cities and Safe Public Places* di Rwanda yang dibangun pada masa implementasi UNDAP I. Proyek ini bertujuan untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan UN Women menginisiasi *Safe Mini-Market* sebagai ruang berjualan yang aman dan ramah terhadap perempuan. Secara keseluruhan, terdapat 16 *Safe Mini-Market* yang telah

berhasil terbentuk sejak tahun 2014 (The Guardian, 2018). Terdapat hampir 100 pedagang perempuan yang telah menjalankan bisnisnya di *Safe Mini-Market*, dan mereka merasa lebih aman saat mereka berjualan di *Safe Mini-Market* dibandingkan ketika mereka berjualan di jalanan.

Proyek *Isange One Stop Centre* dan *Safe Mini-Market* telah menunjukkan bahwa UN Women ikut terlibat dalam aktivitas operasional dari dua program tersebut. Sebagai agensi pemimpin *Joint Programme "National Scale up of the Isange One Stop Centre approach in Rwanda"*, UN Women memberikan bantuan teknis, operasional, serta pengelolaan finansial proyek. Selain itu, UN Women juga bertindak sebagai inisiator *Safe Mini-Market* dalam proyek *Safe Cities and Safe Public Places* di Kota Kigali. Keberadaan *Safe Mini-Market* dapat meningkatkan kondisi perekonomian perempuan, sehingga mereka dapat berjualan tanpa khawatir terhadap ancaman kekerasan oleh siapapun.

### c. Fungsi Artikulasi dan Agregasi

Archer (2001) menjelaskan bahwa organisasi internasional dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya sendiri terlepas dari kepentingan anggotanya. Hal ini dilakukan dengan secara langsung menyampaikan nilai-nilai dan permintaannya dalam sistem internasional. Sedikit berbeda dari pendapat Archer, organisasi internasional dalam kasus ini, yaitu UN Women, menyampaikan nilai-nilai dan permintaan terkait isu kekerasan terhadap perempuan di negara Rwanda.

UN Women menilai bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang akan mempengaruhi kehidupan perempuan secara negatif. Kekerasan ini dapat mengganggu kesejahteraan perempuan dan mencegah

partisipasi penuh perempuan dalam masyarakat (UN Women, 2019). Maka dari itu, UN Women menyuarkan isu ini dan memunculkan solusi untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tercermin melalui program-programnya dalam UNDAP I.

Kekerasan terhadap perempuan sendiri merupakan salah satu isu dalam SDGs, spesifiknya SDG 5 target 5.2 yang berupaya untuk mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (United Nations, 2020). UNDAP I sendiri memiliki kaitan yang erat dengan SDGs, sehingga penulis menganalisis fungsi artikulasi dan agregasi UN Women dengan melihat juga SDGs. Hal ini akan dilakukan dengan melihat tindakan UN Women dalam mengintegrasikan isu kekerasan terhadap perempuan melalui program-program pada masa UNDAP I.

Laporan akhir UNDAP I tidak menjelaskan kaitan antara SDGs terhadap setiap area kinerja dengan spesifik. Namun, laporan tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan diwujudkan pada area kinerja tiga (3), yaitu pembangunan manusia. Hal ini ditunjukkan oleh indikator dua (2), yaitu jumlah wanita, pria, anak perempuan dan anak laki-laki yang mengalami kekerasan berbasis gender (GBV) dan Pelecehan Anak yang menerima perawatan di *Isange One Stop Centre* (United Nations Rwanda, 2018).

**Tabel 4. Area Kinerja UNDAP I**

No.	Area Kinerja
1	Transformasi Ekonomi
2	Pemerintah yang Akuntabel
3	Pembangunan Manusia
4	Respon Humanitarian dan Manajemen Bencana

(United Nations Rwanda, 2018)

*Common Country Analysis* (CCA) sebagai bentuk laporan evaluasi dari UNDAP I memberikan laporan yang lebih komprehensif terhadap program-program yang telah berkontribusi dalam SDGs, termasuk SDG 5, dibandingkan dengan laporan akhir UNDAP I. Menurut CCA, kontribusi UNDAP I dalam SDG 5 ditunjukkan secara eksplisit melalui proyek *Isange One Stop Centre* (IOSC). UN Women meningkatkan kapasitas pelayanan serta cakupan area kinerja IOSC. Selain itu, seluruh kampanye untuk mencegah dan meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan berbasis gender juga ikut berkontribusi dalam SDG. Selain itu, seluruh kampanye untuk mencegah dan meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan berbasis gender juga ikut berkontribusi dalam SDG 5 (United Nations, 2017). Hal ini menunjukkan adanya tindakan UN Women untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan isu kekerasan terhadap perempuan dalam UNDAP I.

Penulis lebih lanjut melakukan analisis hasil kinerja UN Women dalam UNDAP I terhadap target 5.2. Proyek seperti kampanye HeforShe dan peningkatan kapasitas *Isange One Stop Centre* telah menunjukkan bagaimana UN Women berupaya mencegah kekerasan terhadap perempuan. Hal ini secara mendasar dilakukan dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat dalam merespon kekerasan terhadap perempuan.

Upaya UN Women dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui program dan proyek-proyek dalam kerangka UNDAP I telah menunjukkan kaitan aktivitas UN Women dengan SDGs, dalam hal ini SDG 5 target 5.2. Meski tidak dijelaskan secara eksplisit, UNDAP I tetap mengintegrasikan realisasi SDG 5 terutama pada target 5.2 melalui aktivitas-aktivitas agensinya, termasuk oleh UN Women. Hal ini teridentifikasi melalui

hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas UN Women selama masa implementasi UNDAF I, baik itu melalui laporan CCA, laporan akhir UNDAF I, maupun hasil aktivitasnya.

### **Peran UN Women sebagai Aktor Independen dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Rwanda**

Archer (2001) menjelaskan bahwa organisasi internasional dapat mengambil peranan tertentu dalam sistem internasional. Peran tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu instrumen, arena, dan aktor independen. Peran dari suatu organisasi internasional dapat teridentifikasi melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya. UN Women merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selaras dengan mandatnya, salah satu isu yang menjadi fokus kinerja UN Women di Rwanda adalah kekerasan terhadap perempuan (UN Women, n.d.). Maka dari itu, penulis akan mengidentifikasi peran yang telah diambil oleh UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Rwanda berdasarkan independensi dari aktivitasnya di Rwanda serta analisis fungsi-fungsi yang dijalankannya.

Aktivitas yang telah dilakukan oleh UN Women di Rwanda dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan telah mencerminkan sifat independen dari suatu organisasi internasional. Aktivitas tersebut mengacu pada *United Nations Development and Assistance Plan* tahun 2013 - 2018, atau UNDAF I. Sebagai landasan dari seluruh aktivitas UN di Rwanda, UNDAF I sesungguhnya merupakan bentuk dari *United Nations Development Assistance Frameworks* (UNDAF) di Rwanda (United Nations Rwanda, 2018).

UNDAF adalah kerangka yang dibentuk oleh UN sebagai acuan sistematis dalam mengelola program UN di suatu negara, sehingga program dapat berjalan dengan efisien dan

efektif. Namun, tujuan dari UNDAF sendiri adalah untuk mendukung pencapaian agenda 2030 dari UN, yaitu SDGs. Hal ini direfleksikan melalui internalisasi SDGs ke dalam program UNDAF, seperti melalui indikator SDGs, promosi pencapaian SDGs, serta pengukuran pencapaian SDGs. Maka dari itu, meskipun UNDAF diselaraskan dengan rencana nasional suatu negara, UNDAF pada dasarnya tetap merupakan mekanisme untuk mendukung pencapaian SDGs bagi negara anggota UN (UNDG, 2017). Dengan demikian, keselarasan UNDAF I dengan EPDRS II dan Rwanda Vision 2020 merupakan bagian dari upaya internalisasi SDGs di Rwanda, yang dalam beberapa program melibatkan peran krusial dari UN Women.

Berdasarkan tiga fungsi yang telah dijalankan oleh UN Women (sosialisasi, operasi, serta artikulasi dan agregasi), penulis mengidentifikasi peran UN Women sebagai aktor independen. Fungsi-fungsi tersebut dicerminkan melalui aktivitasnya dalam kerangka UNDAF I, yaitu: (1) *Joint Programme "Advancing and Sustaining Gender Equality and Women Empowerment"*; (2) *Joint Programme "National Scale up of the Isange One Stop Centre approach in Rwanda"*; dan (3) *Safe Cities and Safe Public Places*. Ketiga program tersebut menunjukkan bagaimana UN Women dapat mengambil keputusan secara independen, yaitu dengan merancang dan mengeksekusi program-program untuk mendukung eliminasi kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan dengan SDG 5 target 5.2.

Kontribusi dari UN Women sebagai pada masa implementasi UNDAF I juga diiringi dengan penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim. Data survei tahun 2010, menunjukkan bahwa sebanyak 56 persen perempuan Rwanda pernah mengalami setidaknya salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim

(National Institute of Statistics of Rwanda, 2012). Sebagai perbandingan, analisis WHO yang dilakukan pada tahun 2017 - 2018 menunjukkan bahwa prevalensi serupa hanya mencapai 23 persen di Rwanda (World Health Organization, 2021). Dengan demikian, terdapat penurunan angka kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim di Rwanda pada akhir masa implementasi UNDAP I.

Organisasi internasional berperan sebagai aktor independen ketika entitas tersebut dapat mengambil suatu keputusan terlepas dari pengaruh dari pihak manapun (Archer 2001). Selaras dengan pendapat tersebut, UN Women telah menunjukkan tindakan independen penanganan kekerasan terhadap perempuan di Rwanda melalui kerangka UNDAP I. Hal ini dicerminkan melalui partisipasi UN Women dalam mencapai SDG 5 target 5.2 yang juga berkontribusi dalam penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim di Rwanda. Dengan demikian, penulis mengidentifikasi bahwa UN Women adalah organisasi internasional yang telah berperan sebagai aktor independen berdasarkan tindakannya dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan di Rwanda.

## PENUTUP

UN Women adalah organisasi internasional yang bekerja secara global dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk di Rwanda. Aktivitas UN Women di Rwanda berada dalam kerangka *United Nations Development Assistance Plan* tahun 2013 - 2018, atau UNDAP I. UNDAP sendiri sesungguhnya merupakan implementasi dari *United Nations Development Assistance Frameworks* (UNDAF) di Rwanda (United Nations Rwanda, 2018). Sebagai acuan sistematis dalam mengelola program-program UN di suatu negara, UNDAF memiliki tujuan yang spesifik, yaitu untuk mendukung pencapaian *Sustainable*

*Development Goals* (SDGs) (UNDG, 2017). Sebagai agensi UN, UN Women ikut berperan sebagai aktor independen dalam realisasi SDGs di Rwanda melalui aktivitasnya dalam UNDAP I.

Independensi dari UN Women dalam kerangka UNDAP I ditunjukkan melalui perannya sebagai *Lead Agency* atau agensi pemimpin dari dua *Joint Programme*, yaitu "*Advancing and Sustaining Gender Equality and Women Empowerment*" dan "*National Scale up of the Isange One Stop Centre approach in Rwanda*", serta sebagai inisiator "*Safe Cities*" di Kota Kigali. UN Women menginisiasi aktivitas-aktivitas pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, yang meliputi juga kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan aktivitas tersebut, UN Women dapat berperan sebagai aktor independen dengan fungsi fungsi organisasi internasional.

UN Women menunjukkan perannya sebagai aktor independen dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Rwanda melalui tiga fungsi, yaitu: (1) sosialisasi; (2) operasi; serta (3) artikulasi dan agregasi. Hal ini teridentifikasi melalui aktivitas UN Women dalam kerangka UNDAP I. Fungsi sosialisasi dijalankan pada level pertama, yaitu dengan secara langsung berupaya untuk mengubah pola pikir atau perilaku masyarakat dalam merespon kekerasan terhadap perempuan melalui kampanye HeforShe dan pendekatan MenEngage. Fungsi operasi ditunjukkan oleh UN Women melalui dukungannya dalam program peningkatan kapasitas Isange One Stop Center (IOSC) serta inisiasi Safe Mini-Market. Fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan dilakukan melalui penyaluran nilai-nilai SDGs, terutama SDG 5 yang dilakukan melalui program dalam kerangka UNDAP I.

Tindakan dari UN Women di Rwanda selama masa implementasi UNDAP I sendiri berkontribusi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Rwanda. Berdasarkan laporan *Common Country Analysis* (CCA) dan laporan akhir UNDAP I, IOOSC adalah program tersukses dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Rwanda yang sekaligus telah berkontribusi dalam SDG 5. Secara keseluruhan, program-program penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dijalankan oleh UN Women telah berkontribusi dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, yang mendukung salah satu 70 target SDG 5, yaitu target 5.2. Hal ini diperkuat dengan adanya pengurangan prevalensi kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim pada masa akhir implementasi UNDAP I, yaitu yang mulanya mencapai 56 persen pada tahun 2010 menjadi 23 persen pada tahun 2018.

Penulis berharap agar penelitian pada topik serupa dapat mempertimbangkan pentingnya kaitan program agensi UN dengan target SDGs secara mendetail. SDGs akan semakin relevan di tahun-tahun mendatang, sehingga adanya data yang konkrit dapat memperkuat analisis peran dan fungsi organisasi internasional terhadap agenda 2030. Selain itu, implementasi UNDAP tahun 2018 - 2023 (UNDAP II) di Rwanda akan berakhir pada tahun tulisan ini dibuat. Maka dari itu, penulis berharap agar penelitian pada topik serupa dapat dilanjutkan dengan melihat hasil dari kinerja UN Women pada periode UNDAP II.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Archer, C. (2001). *International Organizations*. Taylor & Francis.

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.

Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods & Techniques* (2nd ed.). New Delhi: New Age International.

### Skripsi

Mahardika, N. M. (2021). *Peran dan Fungsi UN Women dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Uganda (2014 - 2021)*.

### Jurnal

Apsari, N., Priadarsini, N., & Parameswari, A. (2019). Peran UNAIDS Dalam Menangani Masalah HIV/AIDS Terhadap Perempuan di Afrika Selatan Pada Tahun 2011-2015. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(1). Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/46282>.

Melia Dwiyani, M., Rainy Priadarsini, N., & Prameswari, A. (2015). PERAN UNICEF DALAM MEMBANTU MEMAJUKAN PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI NIGERIA. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(03). Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/15671>.

Resita Yuana, N., Sushanti, S., & Widya Nugraha, A. (2018). Peran UNDP Dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sudan Selatan Melalui Program UNSCR 1325. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(2). Diakses melalui

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/43351>.

- Muluneh, M. D., et al. (2020). Gender Based Violence against Women in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cross-Sectional Studies. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3), 903. Diakses melalui <https://doi.org/10.3390/ijerph17030903>.
- Ramadhan, I., & Ma'sumah, I. (2018). Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), 144. Diakses melalui <https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.871>.
- Shamimi, Z., Rijal, N. K., & Aufiya, Mohd. A. (2022). Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's). *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(1), 1. Diakses melalui <https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.31062>.
- Sardinha, L., et al. (2022). *Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018*. Diakses melalui [https://doi.org/doi.org/10.1016/%20S0140-6736\(21\)02664-7](https://doi.org/doi.org/10.1016/%20S0140-6736(21)02664-7).
- Dokumen**
- Deuxième Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC II 2013-2014)*. (2014). République Démocratique du Congo.
- Ministry of Gender and Family Promotion. (n.d.). *Key Achievements of the Joint Programme on Advancing and Sustaining Gender Equality Gains in Rwanda*.
- Mannell, J., & Jackson, S. (2014). *Intimate Partner Violence in Rwanda: Women's voices*. London School of Economics.
- National Institute of Statistics of Rwanda. (2012). *Rwanda Demographic and Health Survey 2010*.
- National Institute of Statistics of Rwanda. (2016). *Rwanda Demographic and Health Survey 2014-15*.
- National Institute of Statistics of Rwanda. (2021). *Rwanda Demographic and Health Survey 2019-20*.
- Tanzania National Bureau of Statistics. (2011). *Tanzania Demographic and Health Survey 2010*.
- Uganda Bureau of Statistics. (2012). *Uganda Demographic and Health Survey 2011*.
- UNDG. (2017). *United Nations Development Assistance Framework Guidance*. UN Development Operations Coordination Office. [https://unsdg.un.org/sites/default/files/2017-UNDAF\\_Guidance\\_01-May-2017.pdf](https://unsdg.un.org/sites/default/files/2017-UNDAF_Guidance_01-May-2017.pdf).
- United Nations. (2010). *A/Res/64/289: Resolution Adopted by the General Assembly on 2 July 2010*.
- United Nations. (2015). *The World's Women 2015: Trends and Statistics*. United Nations New York.
- United Nations. (2015). *A/Res/70/I : Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- United Nations Rwanda. (2017). *Rwanda Common Country Analysis Final Report*.
- United Nations Rwanda. (2018). *United Nations Development Assistance Plan 2013 - 2018 (UNDAP I) Final Report*.
- UN Women. (2016). *Report on the Final Evaluation of the Project for the National*

*Scale Up of the Isange One Stop Center Model in Rwanda.*

- UN Women. (2017). *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Results Report.*
- UN Women. (2018). *Country Portfolio Evaluation Draft Report Rwanda Strategic Note 2014 - 2018.* UN Women.
- UN Women. (2018). *The Joint Programme "Advancing and Sustaining Gender Equality Gains in Rwanda" Final Evaluation.*
- World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates 2018.*
- Website**
- MenEngage. (n.d.). *Rwanda.* Diakses 22 Mei 2023. <https://menengage.org/country/rwanda/>
- The Guardian. (2018). *What Would a City that is Safe for Women Look Like?.* Diakses 22 Mei 2023. <https://www.theguardian.com/cities/2018/dec/13/what-would-a-city-that-is-safe-for-women-look-like>.
- UN DESA. (2019). *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN) | Department of Economic and Social Affairs.* Diakses 1 Mei 2023. <https://sdgs.un.org/un-system-sdg-implementation/united-nations-entity-gender-equality-and-empowerment-women-un-women>.
- UN Women. (n.d.). *UN System Coordination.* Diakses 1 Juni 2023. <https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination#:~:text=Within%20the%20UN%20system%2C%20UN%20Women%20is%20mandated>.
- UN Women. (2019). *About UN Women.* Diakses 11 Juni 2023. <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>.
- UN Women. (2019). *In focus: Women and the Sustainable Development Goals (SDGs).* Diakses 1 Mei 2023. <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs>.
- UN Women. (2019). *What we do: Ending violence against women.* Diakses 9 Mei 2023. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women>.
- UN Women Africa. (2015). *Rwanda officially launches its HeForShe Campaign and flags off the IMPACT 10x10x10 Program.* Diakses 22 Mei 2023. <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2015/09/rwanda-officially-launches-its-heforshe-campaign>.
- UN Women Africa. (2017). *ISANGE One Stop Center Video Documentary - Rwanda.* Diakses 18 Mei 2023. <https://youtu.be/wM6RKxtLkkM>.
- United Nations. (2020). *Department of Economic and Social Affairs.* Diakses 1 Juni 2023. <https://sdgs.un.org/>.
- United Nations Rwanda. (2018). *From High-Risk to a Safer Business Environment: the Story of the Kigali Safe Mini Market.* Diakses 1 Juni 2023. <https://rwanda.un.org/en/1222-high-risk-safer-business-environment-story-kigali-safe-mini-market>.
- World Health Organization. (2021). *Violence Against Women.* Diakses 23 Desember 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.